



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2022

BPK - Kab. Bojonegoro Hal 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Pemkab Bojonegoro Kembali Raih WTP BPK 8 Kali

Bojonegoro, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut sudah delapan kali berturut-turut sejak tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan diberikan kepada Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Nurul Azizah di Gedung BPK, Sidoarjo, pada Selasa (26/4). Penyerahan tersebut bersamaan dengan penyerahan LHP oleh BPK.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah menuturkan, penghargaan tersebut berupa LHP BPK pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022.

"Bojonegoro WTP tahun 2021 ini hasil WTP berturut-turut ke delapan," tutur Sekda Nurul. Sekda berharap, dengan WTP yang diterima Pemkab Bojonegoro Nantinya pengelolaan keuangan Pemkab Bojonegoro semakin tertib dan benar.

"Setelah menerima penghargaan selama berturut-turut, harapan kami Bojonegoro ini makin tertib," harap Sekda. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah mengatakan, tengah menerima LHP BPK Laporan Keuangan Pemkab Tahun Anggaran 2021.

Tercatat sebanyak 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bojonegoro salah satunya. Adapun empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Jombang, Magetan, Ngawi dan Kabupaten Tuban.

"Bojonegoro memperoleh opini WTP ke 8 berturut-turut mulai 2014," sambungnya. Bahkan, Luluk juga turut mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, dengan diperolehnya opini WTP yang ke-8 pada tahun 2021.

"Dimana menggambarkan perbaikan tatakelola dan komitmen dari seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah," ucapnya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Teguh Prihandono menyampaikan, opini WTP atas LKPD tahun 2021 diraih berkat komitmen dan kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Bojonegoro. Termasuk dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.

"Kami berharap, dengan mendapatkan opini WTP ini pengelolaan keuangan kita sudah lebih akuntabel. Dan SAP atau standar akuntansi pemerintahan sudah sesuai," tegasnya. [bas.dre]